

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan penting mengenai tindak pidana kejahatan yang nyata terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden yang dilihat dari perspektif asas kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa Asas Kepastian Hukum memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan menaham hukum di suatu negara. Dalam konteks tindak pidana kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, hal ini berperan dalam memberikan jaminan bahwa tindakan pidana yang dilakukan terhadap mereka akan diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang yang berlaku.
2. Implikasi tindak pidana kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden memiliki dampak yang lebih luas daripada tindakan kriminal biasa. Sebagai pemimpin negara, mereka memiliki martabat dan kedudukan khusus yang harus dilindungi secara hukum. Dengan demikian, asas kepastian hukum menjadi penting dalam mengatur tindakan pidana semacam itu agar tidak melanggar hak-hak dan martabat pejabat negara tersebut. Meskipun penting untuk melindungi martabat Presiden dan Wakil Presiden, asas Kepastian Hukum juga harus mengakomodasi hak-hak bantuan yang dijamin oleh hukum. Proses pengadilan terhadap tindak pidana terhadap pejabat negara harus transparan, adil, dan

memenuhi standar hukum yang berlaku. Asas Kepastian Hukum harus dipastikan tidak menjadi alasan untuk merugikan hak-hak individu.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar sistem hukum dalam melakukan tindak pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap menjunjung tinggi sebagai kepastian hukum. Penegak hukum harus transparan, proporsional, dan konsisten, serta dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi individu. Perlu adanya harmonisasi antara perlindungan martabat jabatan dengan kebutuhan untuk menjaga ruang bagi kritik dan ekspresi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya;
2. Klarifikasi Hukum yang Teliti, pastikan bahwa undang-undang yang mengatur tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden dirumuskan secara cermat dan rinci. Definisi tindakan yang melanggar martabat mereka harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.